

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar Realisasi  
Pencapaian Target  
Kinerja Keuangan*

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, target (pajak/retribusi) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2017 adalah Rp0,-.

Alokasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp19.638.000.000,00 untuk membiayai Belanja Pegawai, sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp43.679.356.400,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 19.528.155.624,- atau 99,44% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 35.972.984.893 ,- atau 82,36% dari anggaran.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,- atau 0% dari target yang direncanakan APBD murni sebesar Rp 0,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,-, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 lebih besar/kecil Rp0,- atau naik 0%.

Realisasi Belanja SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 55.501.140.517,- atau 87,66% dari anggaran yang direncanakan dalam APBD murni sebesar Rp 58.113.141.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 47.822.851.949 realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 bertambah sebesar Rp 7.678.288.568 atau naik 16,05%. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

#### 3.2. Hambatan dan Kendala

*Hambatan dan  
Kendala*

Pada pelaksanaan APBD TA 2017 terdapat 8 (delapan) Kegiatan yang realisasi penyerapan anggrannya sd. 31 Desember 2017 hanya mencapai kurang dari 80% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2017. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

##### 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Anggaran Rp 172.564.000, realisasi penyerapan anggaran Rp 113.539.000 atau 65,80%. Kendala yang dihadapi dari kegiatan ini adalah kegiatan ini menganggarkan dana untuk pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan dan penegetahuan kerja aparatur/ASN di OPD Bappeda Provinsi Banten namum karena kursus-kursus dan pelatihan yang diikiti oleh ASN telah dibiayai oleh instansi pengundang maka dana yang disediakan oleh OPD Bappeda tidak diserap untuk efesiensi. Adapun rincian anggaran yang tidak terserap tersebut antara lain Tolok Ukur Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda sebesar Rp 32.525.000 terdiri dari Honorarium Tim pengadaan barang

dan jasa Rp 1.300.000, Belanja Pengiriman Kursus-kursus singkat/pelatihan Rp 21.225.000 dan Belanja Jasa Instruktur/Narasumber Rp 10.000.000. Tolok ukur Administrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten sebesar Rp 8.000.000 terdiri dari Belanja Cetak Rp 800.000, Belanja Penggandaan Rp 200.000 dan Belanja Jasa Infrastruktur/Narasumber Rp 7.000.0000. Tolok ukur Penyusunan Standar SKP sebesar Rp 9.000.000 terdiri dari Belanja Perlengkapan Peserta Rp 3.000.000 dan Belanja Jasa Instruktur/Narasumber Rp 6.000.000.

2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah.

Anggaran Rp 4.353.362.500 realisasi penyerapan Rp 3.326.242.468 atau terserap 76,64%. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan adalah keterbatasan personil untuk melaksanakan perjalanan dinas yang direncanakan dan terbatasnya waktu pelaksanaan setelah perubahan anggaran. Selain itu adanya kegiatan strategis lain yang pelaksanaannya bersamaan. Adapun dana yang tidak terserap Rp 1.017.120.032 yang terdiri dari Sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 255.620.900 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 761.499.132

3. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

Anggaran Rp 167.400.000 realisasi penyerapan anggaran Rp 125.874.100 atau 75,19%. Sisa anggaran Rp 41.525.000 terdiri dari Sisa anggaran tolok ukur Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten Rp 13.561.000 terdiri dari sisa anggaran honorarium pejabat/pokja pengadaan barang dan jasa Rp 2.600.000, belanja perlengkapan peserta Rp 9.390.000, belanja penggandaan Rp 571.000 dan belanja instruktur/narasumber Rp 1.000.000. Sisa anggaran tolok ukur Pengelolaan perpustakaan khusus Bappeda Provinsi Banten Rp 27.964.900 yang terdiri dari sisa anggaran Belanja Perlengkapan Peserta Rp 5.000.000, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber Rp 5.000.000. dan sisa anggaran atau efisiensi (sisa kontrak) belanja modal pengadaan Buku-buku Perpustakaan Rp 17.964.000.

4. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Anggaran Rp 1.276.425.000 realisasi penyerapan anggaran Rp 522.070.000 atau 40,90%, sisa anggaran Rp 754.355.000 Pada APBD TA 2017 penyerapan anggaran ini terendah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan adanya tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu Tolok Ukur Disain Pemetaan Tenaga Pendidik dengan anggaran Rp 676.425.000 karena adanya kendala tidak tercapainya kesepakatan antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Pemerintah Provinsi Banten untuk melaksanakan tolok ukur kegiatan tersebut. Selain tolok ukur tersebut sisa anggaran juga disumbang dari tolok ukur Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan Rp 51.250.000 berupa anggaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Tolok Ukur Rapat Koordinasi (Rakorbid) Sosial dan Pemerintahan Tahun 2017 Rp 13.120.00, Tolok Ukur Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan Rp 7.430.000, Tolok Ukur Identifikasi dukungan/kontribusi keagamaan terhadap IPM Rp 5.380.000. Sisa anggaran dari ketiga tolok ukur tersebut adalah sisa/efisiensi kontrak Belanja Sewa Ruang Rapat, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan dan Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan. Sedangkan sisa anggaran dari Tolok Ukur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Tahun 2017 Rp 750.000 adalah dari sisa anggaran belanja cetak.

5. Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan

Anggaran Rp 796.516.000 Realisasi Rp 593.919.400 atau 74,56% sisa anggaran Rp 202.596.600. Adapun sisa anggaran tersebut adalah merupakan efisiensi dari pelaksanaan tolok ukur yang ada yaitu Rapat Koordinasi Simplifikasi Regulasi Tahun 2017 Rp 4.240.000, Tolok Ukur Perencanaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Rp 3.500.000, Tolok Ukur Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal Rp 6.690.000, Tolok Ukur Evaluasi Implementasi UU 23 Tahun 2014 Rp 22.711.000, Tolok ukur Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan Rp 3.645.000, Tolok Ukur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mktra Lingkup Subid Tata Pemerintahan Tahun 2017 Rp 17.480.000, Tolok Ukur Rakorbid Tematik Pemerintahan Rp 7.500.000 dan Tolok Ukur Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi dan Kabupaten/Kota Rp 44.200.000. Adapun efisiensi terjadi karena tidak diserapnya anggaran belanja jasa tenaga ahli dan belanja jasa instruktur/narasumber karena berasal dari internal Provinsi Banten.

6. Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

Anggaran Rp 2.760.767.000 Realisasi Rp 1.534.983.000 atau 55,60% sisa anggaran Rp 1.225.784.000. Efisiensi yang ada dari kegiatan ini berasal dari tidak diserapnya anggaran Tolok Ukur Desain Pemetaan Untuk Pelaksanaan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten Rp 700.280.000 dan dari Sisa Anggaran Tolok Ukur yang lainnya yaitu Kaji terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Rp 30.605.000, Kaji Terap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp 92.298.000, Kaji Terap Pemberdayaan Ekonomi Kretatif Industri Kecil dan Menengah Rp 106.404.000, Survey Kepuasa Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Banten Rp 25.143.000, Kajian Analisa Belanja Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Rp 27.956.000, Kajian Pengembangan Model Penanganan Penyakit Jiwa Berbasis Masyarakat Rp 77.849.000, Kajian Koridor Ekonomi Provinsi Banten Rp 38.674.000, Kajian Kualitas Belanja Pelayanan Dasar Rp 27.325.000 dan Kajian Relevansi Pendidikan Kejuruan Melalui Strategi Kemiteraan SMK-Industri di Provinsi Banten Rp 99.250.000

7. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Anggaran Rp 638.620.000 Realisasi Rp 504.765.000 atau 79,04 % sisa anggaran Rp 133.855.000. Efisiensi yang ada dari kegiatan ini berasal dari tidak diserapnya anggaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Perlengkapan Peserta, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Jasa Narasumber, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Uang saku Peserta, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi dan dari sisa kontrak. Sedangkan rinciannya adalah dari Tolok Ukur Penyusunan Roadmap SIDA Provinsi Banten Tahun 2018-2022 Rp 105.655.000, Tolok Ukur Kaji Terap pemanfaatan Sumber Energi Alternatif (TTG) untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Miskin Rp 9.650.000, Tolok Ukur Forum

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi melalui Start Up Program , PPBT dan Inkubasi Bisnis Rp 18.550.000.

8. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Anggaran Rp 1.050.000.000 Realisasi Rp 735.405.250 atau 70,04% sisa anggaran Rp 314.594.750. Adapun sisa anggaran dari kegiatan ini berasal dari tolok ukur Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Rp 57.986.000, Tolok Ukur Forum Data Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) Rp 10.117.000, Tolok Ukur Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Untuk Kab/Kota Rp 2.684.000, Updating Website Litbang Rp 174.821.850, Seminar Qoloqium Libangda (regional dan Daerah) Rp 44.900, Majalah dan Jurnal Litbang Tahun 2017 Rp 68.901.000 (Hanya diserap 1 (satu) edisi karena keterbatasan waktu) dan Tolok Ukur Rapat Koordinasi Implementasi Hasil Kajian Litbang Rp 40.000.

Berdasarkan uraian dari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh kegiatan di atas maka dapat dilihat adanya beberapa kegiatan yang tidak menyerap anggaran Honorarium dan Belanja Jasa Instruktur/narasumber dan Jasa Tenaga Ahli karena pada TA 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan sudah tidak boleh dibayarkan khususnya kepada Apartur yang bersasal dari Internal Provinsi Banten. Selain juga terdapat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran setelah perubahan DPA yaitu +- 2 (dua) bulan menjelang akhir tahun anggaran.